

Serah Terima Jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat

Pada hari Jumat, 7 September 2018, dilangsungkan acara serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat dari Dra. Ida Sundari, M.M. yang kini menjabat sebagai Inspektur Utama kepada Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Hadir dalam acara ini Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D; Tortama VI BPK RI, Dori Santosa, S.E., M.M.; Kepala Auditorat VI.B, Rita Amelia, S.E., M.M., Ak. dan beberapa kepala perwakilan dan pejabat dari BPK perwakilan wilayah timur.

Pada acara ini, Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D. berkesempatan untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D. menyatakan bahwa kegiatan promosi, rotasi, dan mutasi dalam suatu organisasi merupakan upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan profesionalisme organisasi. Beliau menyatakan bahwa kegiatan serah terima jabatan yang telah dilaksanakan pada hari ini merupakan bukti bahwa BPK terus berusaha mengupayakan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam kesempatan ini, beliau juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Saudara Dra. Ida Sundari, MM atas kontribusi terbaiknya untuk BPK selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan berharap dengan jabatan barunya sebagai Inspektur Utama, kinerja dan sumbangan pemikirannya dalam manajemen pemeriksaan internal dapat terus ditingkatkan.

Kepada Saudara Joko Agus Setyono yang menggantikan Saudari Dra. Ida Sundari, MM beliau berpesan untuk dapat meneruskan program-program yang selama ini telah dirintis oleh pejabat sebelumnya di Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dengan baik.

Beliau menyatakan bahwa kehadiran BPK Provinsi Kalimantan Barat merupakan wujud amanah UUD 1945 pasal 23 G dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang menyatakan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dengan keberadaan tersebut, diharapkan lebih mendekatkan BPK dengan obyek pemeriksaannya sehingga cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik dapat terwujud.

Dengan adanya Perwakilan BPK di Kalimantan Barat, pimpinan BPK memberikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan BPK untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan

dan tanggung jawab keuangan daerah. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan agar tercipta hubungan kerja yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing antara BPK dengan penanggung jawab entitas di daerah atau wilayah setempat dalam rangka meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan ini pula, Prof. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph.D. menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Barat berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan yang tercermin pada peningkatan perolehan opini WTP. Untuk diketahui, tahun 2017 ada 9 Pemerintah Daerah yang mendapat WTP, dan tahun 2018 berhasil naik menjadi 11. Beliau berharap bahwa opini WTP yang sudah dicapai berjalan selaras dengan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan tersebut dapat diukur dari rendahnya jumlah masyarakat miskin dan tingkat pengangguran, tingginya indeks pembangunan manusia (IPM), dan menyempitnya *gini ratio*. Data BPS Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari 4.04% di tahun 2014 menjadi 4.36% di 2017. Tidak berbeda, jumlah penduduk miskin Kalimantan Barat juga mengalami kenaikan, yakni 382.000 jiwa di 2014 menjadi 387.430 jiwa di 2017. Pada periode yang sama, IPM Provinsi Kalimantan Barat meski menunjukkan kenaikan, yakni 64.89 pada 2014 menjadi 66.26 di 2017 namun kenaikan tersebut masih dalam kategori *medium human development* karena di bawah 70. Sementara, untuk *gini ratio* Provinsi Kalimantan Barat selama tiga tahun terakhir (2015-2017) stagnan di angka 0.33.

Indikator Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,59	65,88	66,26
2	<i>Gini ratio</i>	0,31	0,34	0,33
3	Jumlah Penduduk Miskin	323.615	347.880	377.219
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,15	4,23	4,36
5	Jumlah Pengangguran Terbuka	121.337	100.935	105.061

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D. mengimbau kepada para Kepala Daerah, para pimpinan DPRD dan segenap jajaran instansi pemerintah, agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas saja, tetapi juga memenuhi unsur menyejahterakan rakyat. Dalam UUD 1945, jelas disebutkan bahwa

pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara professional, terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada akhir sambutannya, Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D. berpesan agar dengan dilakukannya serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dari pejabat lama ke pejabat yang baru, akan membawa kita semua kepada kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Beliau juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dra. Ida Sundari, M.M. atas semua usaha dan kerja keras saudari dalam posisi yang sebelumnya. Beliau berpesan kepada saudara Joko Agus Setyono, agar cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan BPK Perwakilan Kalimantan Barat dan dapat mempelajari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik pada pejabat sebelumnya serta dapat melakukan perbaikan yang belum sempat dilakukan untuk perwakilan.